



Analisis Implementasi Good Governance Terhadap Pengelolaan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar

Suci Meinarti¹, Sahade*², Masnawaty S.³

¹Akuntansi Terapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

²Akuntansi Terapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

³Akuntansi Terapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: sahade@unm.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 23, 2024

Revised July 10, 2024

Accepted July 26, 2024

Available online August 14, 2024

Kata Kunci:

Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, Efisiensi, Efektifitas.

Keywords:

Accountability, Transparency, Participation, Effectiveness, Efficiency



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2024 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: untuk mengetahui dan menganalisis implementasi prinsip-prinsip *good governance* terhadap pengelolaan keuangan yang diterapkan di Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar. Populasi penelitian ini adalah laporan keuangan Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar, sedangkan sampel adalah laporan keuangan Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya tahun 2023. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik ini dimulai dengan melakukan wawancara, mengumpulkan data atau dokumen dari sampel, mengolah data, dan menarik kesimpulan. Dari hasil penelitian, menunjukkan bahwa implementasi *good governance* terhadap pengelolaan keuangan pada Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar belum sepenuhnya memenuhi indikator yang diterapkan untuk mengukur Prinsip-prinsip *Good Governance* seperti regulasi yang mengatur bentuk transparansi di Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya belum tersedia, Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar dalam membuat laporan keuangan belum mengikuti ISAK 35 yang mengatur tentang laporan keuangan organisasi nirlaba.

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the implementation of good governance principles in financial management implemented at the Rezki Prasetya Makassar Education Foundation. The population of this research is the financial report of the Rezki Prasetya Education Foundation Makassar, while the sample is the financial report of the Rezki Prasetya Education Foundation for 2023. The data collection techniques used are interviews and documentation. The data analysis technique used in this research is descriptive qualitative. This technique begins with conducting interviews, collecting data or documents from samples, processing the data, and drawing conclusions. From the research results, it shows that the implementation of good governance towards financial management at the Rezki Prasetya Education Foundation Makassar has not fully met the indicators applied to measure the principles of Good Governance such as regulations governing forms of transparency at the Rezki Prasetya Education Foundation are not yet available, the Rezki Prasetya Education Foundation Makassar in making financial reports, they have not followed ISAK 35 which regulates the financial reports of non-profit organizations.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak warga negara, dan pemerintah dinyatakan sebagai aktor yang bertanggung jawab untuk menjamin hak tersebut, tetapi dalam penyelenggaraan

pendidikan, pemerintah tidak mengambil tanggung jawab sendiri. Yayasan tetap diharapkan perannya sebagai salah satu lembaga yang dapat menyelenggarakan pendidikan. Pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting bagi suatu negara, sehingga sangat di perlukan bagi organisasi-organisasi pendukung lainnya yang bergerak di bidang pendidikan. Salah satu bentuk organisasi yaitu Yayasan pendidikan. Pada dasarnya Yayasan bukanlah suatu istilah yang asing di dengar oleh masyarakat saat ini. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan mengartikan bahwa Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.

Yayasan dipercaya dapat membantu masyarakat karena sudah merupakan kebiasaan turun-temurun bahwa Yayasan bukan bertujuan keuntungan, tetapi hadir karena berdasarkan inisiatif dan kepedulian dari pendiri dan pengurusnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Margono (2015:2) menjelaskan adanya kebijakan pemerintah untuk tetap menjaga eksistensi Yayasan dalam menyelenggarakan pendidikan, selain karena kondisi pendidikan yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, dalam hal mengelola pendidikan, aktivitas Yayasan juga dapat dianggap dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat.

Yayasan pendidikan merupakan salah satu badan Nirlaba di Indonesia, Yayasan pendidikan dibedakan menjadi dua jenis yaitu bergerak di bidang pendidikan formal dan sektor pendidikan non formal. Secara garis besar tujuan organisasi atau lembaga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu memperoleh laba atau keuntungan dan yang lainnya adalah Nirlaba, baik lembaga pendidikan swasta maupun yang di dirikan oleh pemerintah. Organisasi sektor publik saat ini dituntut untuk mampu mengefisienkan biaya ekonomi maupun biaya sosial yang dikeluarkan untuk suatu aktivitas yang dilakukan.

Penerapan *good governance* pada organisasi nirlaba juga menjadi hal yang penting. Walaupun wacana atau tuntutan akan *good governance* tidak sekuat pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pada organisasi nirlaba berasal dari para donator-donatur organisasi tersebut. Mengimplementasikan prinsip *good governance* untuk organisasi Nirlaba dapat memperbaiki pengelolaan keuangan dalam menjalankan roda organisasi. *Good governance* menuntut adanya perubahan paradigma berpikir dan bertindak bagi semua elemen sektor publik untuk menghasilkan suatu manajemen keuangan yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan efektif yang mendukung peningkatan peran serta masyarakat dan supremasi hukum di bidang keuangan dan meningkatkan kinerja organisasi atas pemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih, demokratis, dan efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya masyarakat yang madani.

Good governance adalah kepemimpinan yang membangun dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (Ramadhan, A.Z., & Suryaningrum, D.H, 2020). Terdapat beberapa penelitian terdahulu diantaranya, penelitian dengan judul Sandovi1, L., & Putra, E.V (2018) melakukan penelitian tentang Implementasi Good Ngo Governance Pada

Lembaga Swadaya (LSM) Lokal, menemukan hasil yang bervariasi terhadap penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Hal ini menggambarkan bahwa penerapan *good governance* masih harus disempurnakan sehingga *Good governance* bisa digunakan sebagai landasan dalam aktivitas organisasi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan, A.Z., & Suryaningrum, D.H. (2020) dengan meneliti Analisis Penerapan Prinsip *Good governance* pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba juga menemukan hasil yang perlu diperbaiki serta di sempurnakan sehingga penerapan *Good governance* bisa sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Secara umum, akuntabilitas berarti kewajiban suatu organisasi nirlaba untuk membuat perhitungan-perhitungan yang seksama dan mencatatnya dengan gambaran yang benar tentang transaksi finansial dan keadaan organisasi, kemudian menyampaikan laporan tersebut pada laporan tahunan. Berdasarkan uraian tersebut bahwa menyampaikan laporan harus adanya standar yang telah diatur. Penyajian laporan keuangan entitas berorientasi Nirlaba diatur dalam ISAK (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 35 tentang pelaporan entitas Nirlaba. Terdapat lima pelaporan keuangan entitas Nirlaba yang seharusnya diterapkan demi menunjang akuntabilitas yaitu laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Tata kelola organisasi merupakan hal yang sangat penting bagi suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Dewasa ini tidak hanya praktisi pemerintahan dan korporasi saja yang menerapkan prinsip *good governance*, namun organisasi Nirlaba juga dituntut untuk menjadi organisasi yang profesional dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu organisasi berorientasi nirlaba yang ada di Makassar adalah Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar. Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar adalah Yayasan pendidikan yang beralamat di Jl. BTP Buntusu No. 17, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Berdiri pada tanggal 26 Januari 2018. Pimpinan Yayasan bernama H. Abd. Razak, S.Sos, M.M. Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar adalah organisasi Nirlaba maka informasi yang dihasilkan untuk kepentingan manajemen Yayasan dan masyarakat.

Pada Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar menerapkan pencatatan keuangan disetiap terjadinya transaksi yang sudah seharusnya wajib menerapkan prinsip *good governance* untuk mewujudkan tata kelola yang baik. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Analisis Implementasi *Good Governance* Terhadap Pengelolaan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar".

2. METODE

Menurut Sugiyono (2019) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis.

Jadi dapat disimpulkan penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi melalui kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik pengumpulan yang peneliti gunakan yaitu mengambil informasi data primer yang diperoleh selama pengamatan langsung (survei lapangan) dan hasil wawancara dengan informan. Kemudian data sekunder penelitian didapat dari laporan keuangan dan sumber digital atau dokumentasi yang berkaitan dengan Yayasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Prinsip Akuntabilitas

Berikut penyajian data hasil wawancara prinsip akuntabilitas yang dilakukan penulis kepada beberapa responden yang bekerja di Yayasan Pendidikan Rezeki Prasetya Makassar:

Tabel 1. Data Wawancara Prinsip Akuntabilitas

No	Item Pertanyaan	Skor	
		1	0
1.	Apakah staff keuangan Yayasan dalam membuat laporan keuangan sudah tepat waktu?	18	0
2.	Apakah laporan keuangan Yayasan telah mengikuti ISAK 35?	0	18
3.	Apakah ada pelatihan kepada staff keuangan Yayasan terkait laporan keuangan berdasarkan ISAK 35?	0	18
4.	Apakah Yayasan memiliki dewan komite pengawas yang bertugas mengawasi keuangan?	7	11
5.	Apakah setiap unit sekolah telah melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada Dinas Pendidikan tepat waktu?	12	6

Sumber: Data Wawancara Prinsip Akuntabilitas Yayasan Pendidikan Rezeki Prasetya Makassar.

Berdasarkan tabel 1, hasil wawancara terkait prinsip akuntabilitas dapat dilihat bahwa pada skor jawaban “Iya” dari 18 responden adalah sebanyak 37 dan skor jawaban “Tidak” sebanyak 53.

2. Prinsip Transparansi

Tabel 2. Data Wawancara Prinsip Transparansi

No.	Item Pertanyaan	Skor	
		1	0
1.	Apakah seluruh karyawan, pengawas, guru dan pihak yang berkepentingan mengetahui/paham terkait pentingnya penerapan transparansi?	18	0
2.	Apakah regulasi yang mengatur bentuk transparansi di Yayasan Pendidikan Rezeki Prasetya Makassar telah tersedia?	0	18
3.	Apakah staff keuangan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada pengurus, pengawas dan pihak yang berkepentingan?	6	12

4.	Apakah staff keuangan Yayasan mengikut sertakan karyawan, pengawas, guru, dan pihak berpentingan dalam penyusunan rancangan anggaran Yayasan?	18	0
5.	Apakah sudah ada penyuluhan yang dilakukan Yayasan terkait pentingnya regulasi terhadap transparansi?	0	18
6.	Apakah karyawan, pengawas, guru dan pihak yang Apakah informasi yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan yang dibutuhkan sudah jelas?	5	13

Sumber: Data Wawancara Prinsip Transparansi Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar

Berdasarkan tabel 2, hasil wawancara terkait prinsip transparansi dapat dilihat bahwa pada skor jawaban “Iya” dari 18 responden adalah sebanyak 47 dan skor jawaban “Tidak” sebanyak 61.

3. Prinsip Partisipasi

Tabel 3. Data Wawancara Prinsip Partisipasi

No.	Item Pertanyaan	Skor	
		1	0
1.	Apakah seluruh karyawan paham terhadap regulasi yang ada pada UU Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan?	12	6
2.	Apakah seluruh karyawan telah menaati peraturan Yayasan yang sudah ada?	8	10
3.	Apakah Yayasan menunjukkan kepedulian terhadap seluruh karyawan, pengawas, guru, dan pihak yang berkepentingan?	18	0
4.	Apakah partisipasi semua elemen yang ada pada Yayasan ini sudah sesuai dengan yang diatur pada UU Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan?	7	11

Sumber: Data Wawancara Prinsip Partisipasi Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar

Berdasarkan tabel 3, hasil wawancara terkait prinsip partisipasi dapat dilihat bahwa pada skor jawaban “Iya” dari 18 responden adalah sebanyak 45 dan skor jawaban “Tidak” sebanyak 27.

4. Prinsip Efisiensi

Berikut ini disajikan data realisasi anggaran pendapatan dan belanja Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar tahun 2023.

Tabel 4. Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan Yayasan Pendidikan Reski Prasetya Makassar Tahun 2023.

No	Pendapatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Sumbangan	Rp 93.600.000	Rp 75.000.000	80,12
2	Sumbangan terikat	Rp 161.100.000	Rp 161.100.000	100
Jumlah		Rp 254.700.000	Rp 236.100.000	

Sumber: Bendahara Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar

Berdasarkan tabel 4, menunjukkan sumbangan memperoleh 80,12% realisasi dari anggaran. Sedangkan sumbangan terikat memperoleh 100% realisasi dari anggaran.

Tabel 5. Jumlah Realisasi Anggaran Belanja Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar Tahun 2023.

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Operasional	Rp 100.000.000	Rp 84.698.100	84,69
2	Belanja Modal	Rp 80.900.000	Rp 79.544.920	98,32
Jumlah		Rp 180.900.000	Rp 164.243.020	90,79

Sumber: Bendahara Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar

Berdasarkan tabel 5, menunjukkan belanja operasional memperoleh 84,6% realisasi dari anggaran. Sedangkan belanja modal memperoleh 98,32% realisasi dari anggaran.

5. Prinsip Efektifitas

- a) Perbandingan antara realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan.
- b) Hasil perbandingan atau tingkat pencapaian 100% berarti sangat efektif.

Tabel 6. Persentasi Prinsip Efektifitas

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	(%)
1	Belanja Operasional	Rp 100.000.000	Rp 84.698.100	84,6
2	Belanja Modal	Rp 80.900.000	Rp 79.544.920	98,3
Jumlah		Rp 180.900.000	Rp 164.243.020	90,7

Sumber: Bendahara Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar

Berdasarkan tabel 6, menunjukkan realisasi belanja dari anggaran sebesar 90,7%.

B. Analisis Data

1. Analisis Implementasi Prinsip Akuntabilitas pada Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar

Dalam tabel 1, data hasil wawancara prinsip akuntabilitas pada Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar dapat dilihat pada pertanyaan nomor satu, seluruh responden menjawab “Ya” yang berarti bahwa staff Yayasan telah membuat laporan keuangan dengan tepat waktu. Pada pertanyaan kedua, seluruh responden menjawab “Tidak” yang berarti bahwa Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar belum mengikuti ISAK 35 pada proses pencatatan laporan keuangannya. Pada pertanyaan ketiga, seluruh responden menjawab “Tidak” yang berarti bahwa Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya belum pernah mengadakan pelatihan terkait laporan keuangan berdasarkan ISAK 35. Pada pertanyaan keempat tujuh responden yang menjawab “Ya” dan 11 responden yang menjawab “Tidak”, Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar memiliki dewan pengawas yang bertugas mengawasi keuangan dari Dinas Pendidikan pada saat pelaporan Sumbangan Terikat/Dana BOS maka hal itulah yang membuat staff keuangan pada Yayasan masih belum patuh untuk membuat laporan yang baik untuk Yayasan. Pada pertanyaan terakhir 12

responden yang menjawab “Ya” dan enam responden menjawab “Tidak”, hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kesadaran para staff keuangan Yayasan untuk melaporkan pertanggungjawaban keuangan kepada Dinas Pendidikan dengan tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara terkait prinsip akuntabilitas dapat dipresentasikan dengan menggunakan rumus Black dan Champion (2002:302):

$$\text{Presentase} = \frac{37}{90} \times 100\% = 41,1\%$$

Akuntabilitas pada Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar 41,1% **kurang sesuai** dengan indikator akuntabilitas.

2. Analisis Implementasi Prinsip Transparansi pada Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar

Berdasarkan tabel 2, pertanyaan pertama, seluruh responden menjawab “Ya” yang menunjukkan bahwa pentingnya penerapan transparansi sudah diketahui oleh semua elemen yang ada dalam Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar. Pada pertanyaan kedua, seluruh responden menjawab “Tidak” karena Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar belum menyediakan regulasi yang mengatur bentuk transparansi. Pada pertanyaan ketiga ada 12 responden yang menjawab “Tidak” karena laporan pertanggungjawaban keuangan hanya diperlihatkan hanya pada saat pengauditan di Dinas Pendidikan terkait sumbangan terikat. Pertanyaan keempat, seluruh responden menjawab “Ya” mengartikan bahwa Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar melakukan penyusunan rancangan anggaran setiap semester dan melibatkan semua elemen yang ada. Pada pertanyaan kelima, seluruh responden menjawab “Tidak” yang berarti bahwa Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar belum pernah melakukan penyuluhan terkait pentingnya regulasi terhadap transparansi. Pada pertanyaan terakhir, ada 13 responden yang menjawab “Tidak” karena terkait pencatatan laporan keuangan yang ada di Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar masih belum sesuai dengan ISAK 35 sehingga jika dilihat membuat kita bingung dan harus menganalisis agar dapat mengetahui kondisi keuangan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara terkait prinsip transparansi dapat dipresentasikan dengan menggunakan rumus Black dan Champion (2002:302):

$$\text{Presentase} = \frac{47}{108} \times 100\% = 43,5\%$$

Transparansi pada Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar 43,5% **kurang sesuai** dengan indikator transparansi

3. Analisis Implementasi Prinsip Partisipasi pada Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar

Berdasarkan tabel 3, maka dapat dilihat pada pertanyaan pertama ada 12 responden yang menjawab “Ya” yang dimana mereka semua sudah memahami regulasi yang ada pada UU Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Adapun enam orang lainnya belum pernah membuka dan mengetahui isi dari UU tersebut. Pada pertanyaan kedua, sepuluh responden menjawab “Tidak” dikarenakan masih kurangnya kesadaran bahwa aturan yang dibuat Yayasan haruslah dipatuhi. Pertanyaan ketiga, seluruh responden menjawab “Ya” karena menurut mereka Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar sudah menunjukkan kepedulian

terhadap responden seperti memberikan izin jika ada yang sakit maupun ada hal penting lainnya yang membuat mereka harus izin untuk tidak hadir pada hari itu. Pada pertanyaan terakhir, ada 11 responden menjawab “Tidak” karena menurut mereka masih kurangnya kesadaran beberapa orang terhadap partisipasi yang dicantumkan pada UU Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

Berdasarkan hasil wawancara terkait prinsip partisipasi dapat dipresentasikan dengan menggunakan rumus Black dan Champion (2002:302):

$$\text{Presentase} = \frac{45}{72} \times 100\% = 62,5\%$$

Partisipasi pada Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar 62,5% sudah sesuai dengan indikator partisipasi.

4. Analisis Implementasi Prinsip Efisiensi pada Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar

Untuk menganalisis Tingkat efisien dan pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan antar realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan menggunakan rumus Black dan Champion (2002:302) :

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Rp } 164.243.020}{\text{Rp } 236.100.000} \times 100\% \\ &= 69,5\% \text{ (Efisien)} \end{aligned}$$

5. Analisis Implementasi Prinsip Efektifitas pada Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar

Efektifitas Pengelolaan Keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas} &= \frac{\text{Rp } 164.243.020}{\text{Rp } 180.900.000} \times 100\% \\ &= 90,7\% \text{ (Efektif)} \end{aligned}$$

Efektifitas anggaran belanja Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar tersebut dipengaruhi oleh keberhasilan karyawan dalam mengelola pendapatan dan memaksimalkan kebutuhan yang dibutuhkan pada Yayasan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian yang dibuat berdasarkan interpretasi hasil analisis data yang dirumuskan dengan mengacu kepada jawaban terhadap rumusan masalah penelitian dengan memuat uraian sebagai berikut:

1. Prinsip Akuntabilitas

Berdasarkan hasil analisis data mengenai prinsip akuntabilitas menggunakan rumus Black dan Champion (2002:302) pada Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar memperoleh 41,1% yang berarti kurang sesuai dengan indikator yang dikemukakan oleh Hamirul & Alamsyahril (2020). Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar belum melakukan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35 dan belum pernah melakukan pelatihan kepada staff keuangan terkait pencatatan laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang paham terhadap aturan laporan keuangan yang seharusnya diikuti oleh Yayasan.

2. Prinsip Transparansi

Berdasarkan hasil analisis data mengenai prinsip transparansi menggunakan rumus Black dan Champion (2002:302) pada Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar memperoleh 43,5% yang berarti kurang sesuai dengan indikator yang dikemukakan oleh Hamirul & Alamsyahril (2020). Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar belum mempunyai regulasi yang mengatur bentuk transparansi yang baik dijalankan Yayasan. Akibat dari belum adanya regulasi yang dibuat, informasi yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan terkait laporan keuangan tidak jelas dan membuat staff keuangan tidak patuh untuk menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu.

3. Prinsip Partisipasi

Berdasarkan hasil analisis data mengenai prinsip partisipasi menggunakan rumus Black dan Champion (2002:302) pada Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar memperoleh 62,5% yang berarti sesuai dengan indikator yang dikemukakan oleh Hamirul & Alamsyahril (2020). Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar telah menunjukkan kepedulian terhadap elemen yang ada, selain itu beberapa staff maupun guru telah memahami terkait regulasi pada UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

4. Prinsip Efisiensi

Berdasarkan hasil analisis data mengenai prinsip efisiensi menggunakan rumus Black dan Champion (2002:302) pada Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar memperoleh 69,5% yang berarti efisien berdasarkan dengan indikator yang dikemukakan oleh Hamirul & Alamsyahril (2020). Realisasi anggaran pendapatan 92,6% sedangkan realisasi anggaran belanja 90,7% yang mengartikan bahwa Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar efisien terhadap anggaran yang dibuat.

5. Prinsip Efektifitas

Berdasarkan hasil analisis data mengenai prinsip efektifitas menggunakan rumus Black dan Champion (2002:302) pada Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar memperoleh 90,7% yang berarti sudah efektif berdasarkan dengan indikator yang dikemukakan oleh Hamirul & Alamsyahril (2020). Efektifitas anggaran belanja Yayasan Pendidikan Rezki Prasetya Makassar tersebut dipengaruhi oleh keberhasilan karyawan dalam mengelola pendapatan dan memaksimalkan kebutuhan yang dibutuhkan pada Yayasan.

Berdasarkan hasil analisis data, dari pembahasan hasil penelitian dapat dilihat bahwa penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan, A.Z., & Suryaningrum D.H (2020) yang mendapatkan hasil kesimpulan bahwa telah menerapkan dan telah sesuai dengan sembilan prinsip *good governance* yang dikemukakan oleh Sirajuddin dan Winardi (2012). Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Qomariyah (2021) yang mendapatkan hasil analisa dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Yayasan YPI Darussalam adalah yayasan pendidikan yang berhasil mengembangkan organisasi sehingga dapat berkembang dengan cepat dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas

dikarenakan dalam tata kelola organisasinya menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan, A.Z., & Suryaningrum D.H (2020) yang mendapatkan hasil kesimpulan bahwa telah menerapkan dan telah sesuai dengan tiga prinsip *good governance* yang dikemukakan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip *good governance* terhadap pengelolaan keuangan secara umum telah diterapkan pada Yayasan Pendidikan Rezeki Prasetya Makassar tetapi belum sepenuhnya memenuhi indikator yang ditetapkan untuk mengukur prinsip-prinsip *good governance* sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka saran yang dapat penulis ajukan sebagai berikut. Bagi, Yayasan Pendidikan Rezeki Prasetya Makassar sebaiknya membuat laporan keuangan memuat Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35 yang dimana menjadi pedoman penyajian laporan keuangan bagi entitas nirlaba. Yayasan Pendidikan Rezeki Prasetya Makassar juga harus membuat regulasi yang mengatur bentuk transparansi dan harus lebih teliti lagi untuk melihat peluang untuk meningkatkan efisiensi pada Yayasan sehingga karyawan maupun guru berantusias untuk berpartisipasi. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan model analisis data yang lebih kompleks, pengumpulan data yang kongkret.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyahril & Hamirul, (2020). *Good governance Dalam Perspektif Kualitas Pelayanan Publik*. Pustaka Learning Center, Malang.
- Bastian, I. (2011). *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Erlangga.
- Black. James A dan Champion. Dean J, (2002) *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Adiatama.
- Fondy, Z. (2020). *Penerapan ISAK 35 tentang laporan keuangan organisasi nonlaba*. <http://repositori.wbi.ac.id/handle/123456789/92>
- IAI. (2019). *Pengesahan ISAK 35, amandemen PSAK 1, penyesuaian tahunan PSAK 1 dan PPSAK 13*. Ikatan Akuntan Indonesia. <http://www.iaiglobal.or.id/v03/beritakegiatan/detailberita1147=penge-sahan-isak-35-amendemen-psak-1-penyesuaian-tahunan-psak-1-dan-ppsak-13>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Pencabutan PSAK 45 : Pelaporan keuangan entitas nirlaba*. Ikatan Akuntan Indonesia. http://www.iaiglobal.or.id/v03/files/file_berita/DE_PPSAK_13.pdf
- Kustina, K. T., & Sujana, N. P. H. H. (2019). *Mengungkap praktik Good Corporate Governance dalam pengelolaan keuangan organisasi tradisional Subak*. *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, 14(1), 1. <https://jurnal.undhirabali.ac.id/index.php/pariwisata/article/view/687/609#>

- Lailatul, Q., & Erna. S. (2022). Analisis Implementasi *Good governance* Pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi pada Yayasan YPI Darussalam Cerme) Vol. 5 No. 1.
- Margono, S. (2015). *Badan Hukum Yayasan; Dinamika Praktek, Efektivitas, dan Regualitas di Indonesia*. Pustaka Reka Cipta
- Moleong, M.A. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mustikawati, Melyana, & Fajar Satriya Segarawasesa (2023). *Analisis Penerapan Good Governance pada Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidomoyo*. Vol.4 No 5.
- Rahajeng, M. M. (2020). *Penerapan prinsip prinsip good governance dalam pengelolaan dana desa di desa whar wetan kecamatan kalibagor kabupaten banyumas*.
- Rahman, K. G. (2020). *Good governance dan pengendalian internal pada kinerja pengelolaan keuangan*.
- Ramadhan, A.Z., & Suryaningrum, D.H. (2020). *Analisis Penerapan Prinsip Good governance pada Kinerja Keuangan Organisasi Nirlaba*. *Public Management and Accounting Review*, 1(1), 1-9.
- Rukmana, U. N. A., Akram dan Endar. E. (2020). *Prediktor Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Perusahaan*. *Jurnal Emba*, 8 (4): 156-167.
- Sahade & Hamzah. H. (2018). *Pelatihan Penyusunan Keuangan Bagi Pengelola KPRI SMK Negeri 1 Pangkep*. *Prosiding Seminar Nasional Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Makassar*. Makassar: 8 September 2018
- Sandovi1, L., & Putra, E.V (2018). *Implementasi Good Ngo Governance Pada Lembaga Swadaya (LSM) Lokal*. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan* Vol. 1 No. 4.
- Shabira, F. B. (2019). *Pengaruh Environmental Performance, Good Corporate Governance dan Karakteristik perusahaan Terhadap Praktik Environmental Disclosure (Studi pada Perusahaan di Jakarta Islamic Index Tahun 2015-2018)*. *Skripsi*.
- Situmorang, R. (2018). *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility Perusahaan Consumer Goods Yang Terdaftar di BEI periode 2014-2016*. *Skripsi*.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharyani, R., Ulum, I., & Jati, A. W. (2019). *Pengaruh Tekanan Stakeholder dan Corporate Governance terhadap Kualitas Sustainability Report*. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2 (1), 71-92
- Suteja, I. G. N. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan dengan metode altman z-score pada PT Ace Hardware Indonesia Tbk*
- Ula, I. D. (2021). *Penerapan ISAK 35 pada Masjid Baitul hidayah puger jember*. 1(12), 1. <http://repository.unmuhjember.ac.id/9660/>
- Undang-undang No.28 tahun 2004 tentang Yayasan*.
- Widiantara, I. K. A. (2018). *Peran dan strategi public relations dalam pengembangan organisasi nirlaba*. <https://core.ac.uk/download/pdf/327190497.pdf>